

Judul : Tuntaskan Penyelesaian Asuransi Bermasalah
Tanggal : Selasa, 24 Januari 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Tuntaskan Penyelesaian Asuransi Bermasalah



Puteri Komarudin

ANGGOTA Komisi XI DPR RI Fraksi Golkar Puteri Komarudin mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menuntaskan penyelesaian perusahaan asuransi bermasalah.

Puteri menyatakan OJK masih punya pekerjaan besar untuk segera menyelesaikan persoalan perusahaan asuransi yang bermasalah, seperti Jiwasraya, Bumiputera, Kresna Life, dan WanaArtha Life (WAL).

Respon Legislator Beringin di Komisi Keuangan dan Perbankan DPR RI ini setelah Presiden Jokowi memanggil Anggota Dewan Komisio-ner Otoritas Jasa Keuangan (ADK OJK) ke Istana Negara, pada Senin (16/1/2023).

Pada kesempatan itu, Jokowi memberikan penugasan khusus kepada OJK untuk segera menyelesaikan kasus-kasus di sektor perasuransian yang masih belum tuntas.

Meski ADK OJK yang baru saja bertugas sejak Juli 2022 belum selesai menuntaskan kasus gagal bayar sejumlah perusahaan asuransi, namun Puteri tetap memberikan apresiasi atas ketegasan Pimpini-

nan OJK yang baru karena telah mencabut izin usaha (CIU) WanaArtha Life.

"Kami terus mendorong ketegasan OJK untuk menin-dak asuransi bermasalah lain-nya," ujar Puteri, kemarin.

Sebelumnya, OJK telah mengumumkan pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa Adisarana WanaArtha (Wa-naArtha Life atau PT WAL) pada 5 Desember 2022.

Tindakan ini terpaksa dilaku-kan OJK dikarenakan PT WAL tidak dapat memenuhi rasio solvabilitas (risk based capital) yang ditetapkan oleh OJK se-suai ketentuan yang berlaku.

Ini lantaran PT WAL tidak mampu menutup selisih antara kewajiban dan aset akibat akumulasi kerugian yang ber-sasal dari penjualan produk Wa-naArtha Saving Plan (WSP).

"Kasus ini harus menjadi catatan penting bagi OJK untuk semakin meningkatkan kualit-as pengawasan secara kom-prehensif, terintegrasi, dan cer-mat. Sehingga, kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari. Terutama terhadap 13 perusahaan asuransi yang kini ditetapkan dalam status penga-wasan khusus oleh OJK," tegas Wakil Rakyat Dapil Jabar VII (Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta ini).

Puteri mengaku concern terhadap perhatian Presiden kepada industri asuransi meng-ingat persoalan gagal bayar perseroan bermasalah tersebut telah berakibat buruk dan menimbulkan kerugian lahir dan batin ribuan Pemegang Polis (PP).

Sebagai informasi, OJK te-lah menetapkan status penga-wasan khusus terhadap 13 perusahaan asuransi, yang terdiri dari 7 perusahaan asuransi jiwa dan 6 perusa-haan asuransi umum, termasuk Reasuransi. ■ KAL